

NOBEL KEMISKINAN?

Subiakto Tjakrawerdaja *

Nobel Perdamaian 2006 akhirnya jatuh kepada "pejuang kaum miskin." Setelah melalui serentetan kontestasi dan penjurian yang panjang, M. Yunus, tokoh perbankkan dari Bangladesh, pendiri dan pengelola Grameen Bank akhirnya dianggap lebih layak dari peserta lainnya, terniasuk Presiden SBY.

Nobel, sebagai "penghargaan tingkat dunia" tentu saja menarik untuk disimak. Terutama alasan mengapa Nobel Perdamaian kali ini disematkan pada tokoh kemiskinan dan bukan perdamaian. Tak lain karena salah satu akar kekerasan yang mempersulit terjadinya perdamaian adalah "kemiskinan." Itu artinya, membebaskan orang dari kemiskinan adalah membebaskan orang dari kekerasan. Dan, membebaskan orang dari kekerasan adalah modal menciptakan perdamaian. Singkatnya, seluruh kebebasan, termasuk kebebasan dari kemiskinan pada masa sekarang (terutama di negara-negara miskin) jauh lebih penting dari sekedar bebas dari kekerasan dan perang. Mengatasi kemiskinan lebih penting daripada menghadirkan perdamaian.

Dus, kalimat "apalah artinya damai jika miskin," sangat mewakili penghargaan Nobel Perdamaian 2006 kali ini. Jika diteruskan maka kalimatnya menjadi, "apalah artinya merdeka tetapi miskin dan apalah gunanya demokratis tetapi

miskin?" Pertanyaan ini menjadi penting bila kita ajukan kepada rakyat dan pemerintah setelah bangsa ini mendapat julukan sebagai negara demokratis karena sukses melaksanakan pemilu 2004 secara berkualitas.

Hal ini karena kemiskinan pasca pemilu 2004 bukannya berkurang melainkan malah bertambah. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang belum menemukan solusi nyata untuk mengatasi kemiskinan. Di negara kita yang demokratis, tidak ada persoalan yang lebih besar dari persoalan kemiskinan yang mengakibatkan pengangguran dan kekerasan.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, tidak mendapat layanan kesehatan memadai serta tidak dapat tumbuh dalam lingkungan tempat tinggal yang layak. Kemiskinan menyebabkan kurangnya tabungan dari masyarakat dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota Yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara sangat terbatas. Kemiskinan,

* *Pengamat Ekonomi, mantan Menteri Koperasi dan PPK*

menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (safety of life), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit (di bawah UMR).

Lebih jauh, kemiskinan juga membatasi hak rakyat untuk (1) mendapatkan perlindungan hukum; (2) mendapatkan rasa aman; (3) mendapatkan kemaslahatan; (4) mendapat hak partisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (5) mendapat hak berinovasi; (6) menjalankan agamanya (7) mendapatkan kesejahteraan.

Indonesia boleh saja merupakan sebuah negara yang sangat kaya (SDA). Tetapi kekayaan tersebut sebagian telah dijual ke tangan asing dengan harga sangat murah. Sebagian yang lain belum maksimal pengelolaannya. Sementara itu tata kelola keuangan negara belum sempurna. Simaklah tindakan pemerintah ketika mengajukan APBN Perubahan (APBNP) 2006 ke DPR, beberapa waktu yang lalu.

Sebagaimana diketahui, dalam mengajukan APBNP 2006, selain mengubah beberapa asumsi, pemerintah secara jelas mengemukakan bahwa anggaran belanja mengembung dari Rp 647,6 triliun menjadi Rp 689,5 triliun, atau naik Rp 41,9 triliun. Akibatnya, defisit belanja negara membengkak dari 2,4 triliun menjadi Rp 37,6 triliun, setara dengan 1,2 persen PDB. Persoalannya defisit ini ternyata lebih disebabkan adanya pem-

bayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 79,8 triliun (Kompas, 24/6/06). Bukan dipakai untuk membiayai program-program langsung pengentasan rakyat miskin.

Belajar dari Sejarah

Dalam menanggulangi kemiskinan, sebenarnya kita punya sejarah yang tak kalah dari negara-negara lain. Setelah inflasi hampir 600% di tahun 1966 karena kelalaian terhadap prasarana fisik, kecerobohan fiskal, dan retorika revolusioner yang tak kunjung henti negara ini perlahan tetapi pasti mulai berbenah. Pemerintahan menguat dan bervisi lebih ke kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk pengamalan Pancasila (GBHN).

Lewat stabilisasi politik dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7% setahun. Antara 1976 -1996 jumlah penduduk miskin menurun drastis. Yaitu dari 54,2 juta jiwa penduduk miskin, sekitar 40,1 % dari jumlah penduduk di tahun 1976 menurun menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,3 % dari jumlah penduduk di tahun 1996. Prestasi inilah yang membuat World Bank pada tahun 1993 menempatkan Indonesia sebagai kelompok pilihan perekonomian berkinerja tinggi yang menyelenggarakan "mukjizat Asia Timur" yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kesejahteraan yang makin merata (WB, 1993, hal. 1-3). Dan sebagai puncaknya, keberhasilan ini diakui oleh PBB (UNDP) yang memberikan penghargaan pada tahun 1995.

Singkatnya, waktu itu pemerintah berhasil menciptakan angka kemiskinan yang menurun dan memperluas lapangan kerja karena beberapa hal. Pertama, se-

jak Orde Baru para pemimpinnya telah memajukan produktifitas pertanian dan pembangunan pedesaan. Kedua, para ekonom pemerintah mulai melakukan "kerja revolusioner" dengan mendiversifikasi ekonomi, mengetatkan pengeluaran anggaran, menumbuhkan sector swasta dan menguatkan sekaligus mengefektifkan pemerintahan. Ketiga, perluasan program-program kerakyatan seperti inpres desa, kredit pertanian tanpa jaminan, pendidikan dan kesehatan gratis. Anne Both dalam, "Repelita VI and the Second Long Term Development Plan" (1994) menuJis bahwa keberhasilan pengentasan masyarakat miskin di Indonesia dikarenakan kemampuannya dalam menumbuhkan dan mentransformasi pembangunan, fokus dalam pertanian-perindustrian, memulai manufacturing dan ekspor bertahap, mengelola pemasukan dan

pengeluaran pendapatan dengan benar, meningkatkan prasarana dipusat dan daerah, mengelola kependudukan dan pendidikan, serta fokus mengurangi kemiskinan dengan kebijakan yang bertahap tetapi "pas."

Dua tahun sudah kinerja SBY-JK memerintah negeri ini dengan berbagai pencapaiannya. Sudah selayaknya duet pemimpin kita ini dan para pembantuannya bekerja lebih fokus untuk memberantas kemiskinan. Terlebih jika ingin mendapatkan Nobel Perdamaian di masa depan. Karena itu langkah-langkah dan kinerja hams ditingkatkan. Terobosan juga harus dibuat. Tidak salah jika meniru kebijakan Orde Baru yang masih baik (dan teruji) jika belum menemukan obat mujarab bagi pengentasan rakyat miskin di negeri ini.